

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan di Propinsi Jawa Timur yang mencakup 38 kota/kabupaten dengan pertimbangan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur terhadap PDB Nasional relatif lebih besar nilainya bila dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Berita Resmi Statistik No. 09/IX/15 Februari 2006, PDRB Jawa Timur berkontribusi sebesar 15,07% terhadap PDB Nasional, atau memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap PDB Nasional setelah DKI Jakarta. Di samping itu Jawa Timur memiliki potensi yang cukup besar di sektor industri pengolahan; sektor pertanian; dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, karena kontribusi ketiga sektor tersebut selalu mendominasi PDRB Propinsi Jawa Timur, sehingga bisa menjadi *trigger* (penggerak) bagi sektor-sektor yang lainnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur.

Untuk memfokuskan penelitian pada obyek yang akan diteliti, dan agar tidak mengaburkan topik permasalahan yang akan dibahas nantinya, maka penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian. Pada penelitian ini, penulis menetapkan ruang lingkup penelitian dengan meneliti sektor basis hanya sebatas di Propinsi Jawa Timur saja.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Yaitu sebuah penelitian yang membuat suatu klarifikasi suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara menggambarkan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

Kuantitatif sendiri yaitu penelitian yang menggunakan suatu skala numerik (angka).

3.3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian merupakan *desk study* yaitu data telah tersedia pada Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Jawa Timur. Data yang digunakan untuk menentukan sektor basis dalam penelitian ini adalah data PDRB dan jumlah tenaga kerja dari 38 kota/kabupaten yang ada dalam wilayah Propinsi Jawa Timur dengan periode pengamatan tahun 2001-2005. Penelitian ini juga menggunakan RPJMD Propinsi Jawa Timur tahun 2006-2008 yang diunduh dari internet untuk dievaluasi.

3.4. Definisi Operasional

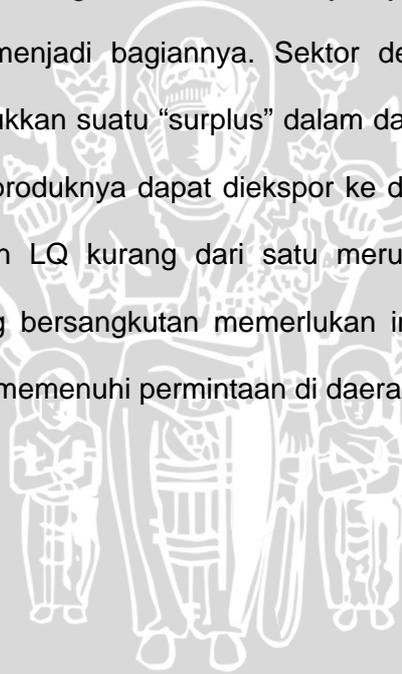
Di dalam penelitian ini terdapat istilah yang belum banyak diketahui oleh orang umum, maka dari itu agar memudahkan orang membaca penelitian ini akan dijelaskan beberapa definisi yang cukup penting, antara lain yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. RPJMD berisi tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
2. Strategi pengembangan wilayah adalah rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya, merekatkan dan

menyeimbangkan pembangunan wilayah dan kesatuan wilayah, meningkatkan keserasian antar kawasan, keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses penataan ruang dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

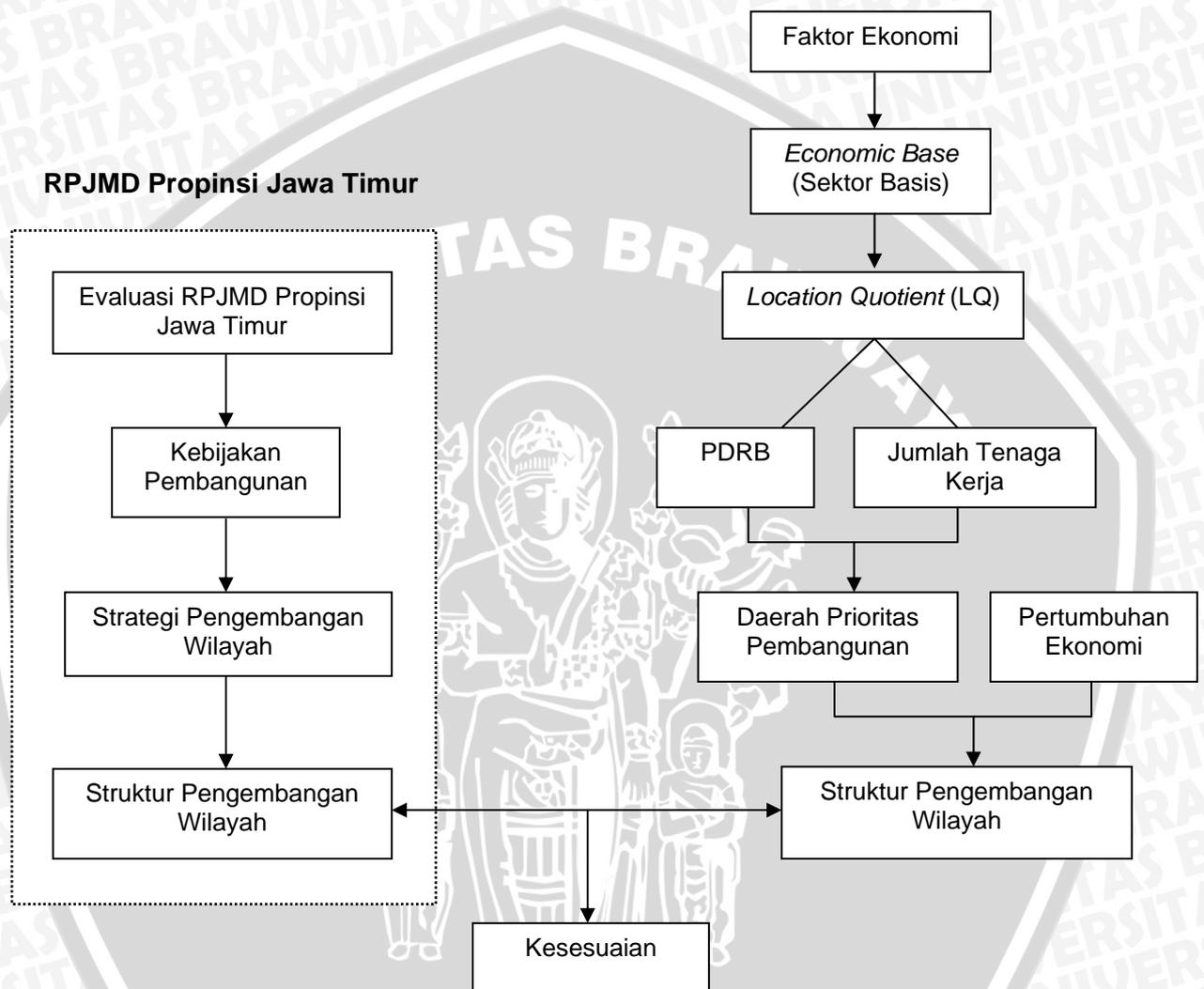
3. Struktur pengembangan wilayah adalah tatanan komponen lingkungan alam, binaan dan sosial yang secara hirarkis dan fungsional berhubungan satu sama lain membentuk tata ruang. Arahkan struktur ruang menitikberatkan pada pengaturan hirarki terhadap pusat-pusat permukiman dan pelayanan barang dan jasa melalui keterkaitan sistem prasarana, serta deliniasi wilayah pelayanan masing-masing pusat pelayanan.
4. Pola pemanfaatan ruang adalah wujud operasionalisasi rencana tata ruang atau pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Pola pemanfaatan ruang biasanya memuat arahan pengelolaan kawasan lindung, pengembangan kawasan budidaya prioritas, dan kriteria pengelolaannya.
5. Sektor basis adalah sektor yang memiliki potensi besar dalam menentukan pembangunan menyeluruh di daerah.
6. Sektor non basis adalah sektor penunjang dari pembangunan menyeluruh tersebut.
7. Kegiatan basis adalah kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke tempat diluar batas wilayah perekonomian karena sektor ini telah bisa mencukupi kebutuhan di dalam daerah.
8. Kegiatan non basis adalah kegiatan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan oleh penduduk di daerah tanpa bisa melakukan ekspor ke luar wilayah, karena kemampuan sektor tersebut dalam mencukupi keperluan penduduk lokal masih terbatas.

9. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah total nilai produk barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan.
10. PDRB per kapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya.
11. *Location Quotient* (LQ) merupakan indeks perbandingan relatif antara sektor i di daerah yang diteliti dengan sektor i di wilayah yang lebih luas, dimana daerah yang diteliti menjadi bagiannya. Sektor dengan LQ lebih besar daripada satu menunjukkan suatu "surplus" dalam daerah tertentu dan, oleh karena itu, beberapa produknya dapat diekspor ke daerah lain. Sebaliknya, daerah-daerah dengan LQ kurang dari satu merupakan daerah "defisit" sehingga daerah yang bersangkutan memerlukan impor beberapa produk dari daerah lain untuk memenuhi permintaan di daerah itu.



3.5. Metode Analisa

Metode analisa dalam penelitian ini adalah seperti yang digambarkan pada *flowchart* dibawah ini:



Berdasarkan pada *flowchart* diatas, maka metode analisa dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan analisa, yaitu:

1. Mengevaluasi RPJMD Propinsi Jawa Timur dengan mengidentifikasi kebijakan pembangunan daerah yang telah dirumuskan. Untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan tersebut, diperlukan

strategi pengembangan wilayah agar tujuan kebijakan pembangunan yang hendak dicapai sesuai seperti yang diharapkan. Setelah strategi pengembangan wilayah diketahui, maka struktur pengembangan wilayah dapat ditentukan yang mana pada akhirnya akan menentukan daerah prioritas pembangunan.

2. Menganalisis peranan faktor ekonomi dalam penyusunan RPJMD Propinsi Jawa Timur dengan mengidentifikasi sektor basis (*economic base*). Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi sektor basis adalah metode LQ (*Location Quotient*) dengan menggunakan satuan PDRB dan jumlah tenaga kerja. Kemudian dilakukan pemetaan untuk menentukan daerah prioritas pembangunan yang didasarkan pada hasil identifikasi sektor basis dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi daerah. Hasil dari pemetaan tersebut kemudian akan digunakan untuk menentukan struktur pengembangan wilayah dengan menggunakan *superimpose*.
3. Menganalisis kesesuaian antara struktur pengembangan wilayah berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur dengan struktur pengembangan wilayah berdasarkan analisis *economic base* (sektor basis).